

## BAB 5 KESIMPULAN

Kecurigaan utama negara-negara Barat terutama Amerika Serikat adalah bahwa program nuklir sipil merupakan kedok untuk menutupi pengembangan senjata nuklir. Persepsi negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran ini cenderung mengabaikan adanya fakta bahwa Iran memang membutuhkan nuklir sebagai sebuah sumber energi alternatif yang juga diharapkan dapat memajukan perkembangan ekonominya. Disatu sisi, sebuah program nuklir sipil yang ditujukan sebagai sumber energi dan dikembangkan secara mandiri memang memiliki peluang yang sama dalam memproduksi material-material yang dibutuhkan dalam pembuatan senjata nuklir. Sedangkan di sisi lain, Iran yang berencana untuk menjadi mandiri (*self sufficient*) dalam hal pengembangan teknologi nuklir dan melepaskan ketergantungan terhadap sumber energi konservatif (minyak dan gas), memiliki hak yang sah dibawah NPT untuk mengembangkan teknologi nuklir sipil. Meskipun dalam pelaksanaannya kepatuhan terhadap protokol-protokol dan pengawasan IAEA merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi.

Posisi Amerika Serikat dalam menyikapi hal ini tidak bisa dipisahkan dari konteks historis hubungan antara kedua negara, perlu diakui bahwa konteks historis ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap bagaimana Amerika Serikat menilai Iran. adanya ketidakpercayaan dan kecurigaan di masa lalu sedikit banyak membuat Amerika Serikat sangat berhati-hati dalam menilai setiap perkembangan dan perubahan di Iran. hal ini agaknya dapat cukup menjelaskan mengapa Amerika Serikat sudah demikian curiga terhadap Iran bahkan sebelum pemerintah Iran mengumumkan secara resmi program nuklirnya. Disamping itu, faktor lain adalah kepentingan Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah. Selain kepentingan yang berkaitan dengan akses terhadap sumber energi, perang terhadap terorisme, dan posisi strategis Iran, hal ini juga berkaitan erat dengan keputusan Pemerintahan Presiden Bush untuk tetap menjalankan kebijakan konfrontatifnya terhadap Iran, yang mengabaikan laporan NIE.

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi alasan kuat mengapa pemerintahan Presiden Bush mengambil langkah demikian. Yang pertama adalah minimnya kepercayaan dari kalangan konservatif garis keras pada pemerintahan Bush terhadap laporan tersebut. Dimana kalangan ini tetap meyakini bahwa kebijakan Presiden Bush tidak boleh berubah karena hasil analisa NIE, mengingat Iran tetap merupakan ancaman bagi keberadaan Amerika Serikat dan sekutu utamanya di Timur Tengah yaitu Israel. Yang kedua, keamanan nasional Israel dapat dikatakan mendominasi agenda kebijakan luar negeri Pemerintahan Bush di Timur Tengah. Sehingga, perubahan dan perkembangan apapun terkait kawasan

tersebut tetap mengedepankan posisi strategis Israel sebagai mitra Amerika Serikat. Dengan demikian, penilaian Amerika Serikat lebih didasarkan pada pertimbangan strategis kepentingannya di kawasan yang berbenturan dengan kepentingan Iran seperti kepentingan Amerika Serikat di Irak, dan keamanan Israel sebagai sekutu utamanya di Timur Tengah. Sehingga adanya perbedaan perspektif antara keduanya mempertajam selisih kepentingan dan sedikit banyak berpengaruh bagi proses penyelesaian krisis nuklir Iran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa krisis nuklir Iran sedikit banyak merupakan permasalahan antara pemerintahan, ketimbang permasalahan antar negara. Mengingat pergantian pemerintahan dapat saja memberikan peluang bagi terciptanya cara pandang baru dari masing-masing negara terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

Dalam merespon program nuklir Iran, Amerika Serikat cenderung memilih pendekatan yang konfrontatif melalui penerapan sanksi, embargo dan pembatasan-pembatasan unilateral, serta kebijakan isolasionis yang diharapkan tidak menyisakan ruang bagi perekonomian Iran untuk mendanai kegiatan-kegiatan inkonvensional seperti program nuklir. Juga tidak mengesampingkan invasi militer sebagai sebuah opsi. Pendekatan ini memiliki perbedaan dengan langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara Eropa seperti Jerman, Perancis dan Inggris yang lebih memilih negosiasi dan diplomasi, sekaligus memberikan kesempatan bagi IAEA sebagai instrumen PBB untuk dapat lebih berperan mengawasi program nuklir Iran.

Meskipun harus diakui bahwa proses negosiasi dan diplomasi berlangsung cukup sulit antara Iran dengan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat, tetapi tidak serta merta membuktikan bahwa Iran adalah negara yang tidak dapat diajak berdialog sama sekali. Dialog yang melibatkan kedua negara sangat mungkin terjadi. Dialog setara antara Amerika Serikat dan Iran pernah terjadi di Bonn, Jerman pada tahun 2001. Sehingga diplomasi harus tetap diupayakan sebagai jalan keluar utama. Sedangkan dalam isu nuklir Iran, yang dapat dikatakan menjadi penghambat adalah pra-syarat yang diajukan Amerika Serikat, bahwa Iran harus menghentikan segala aktifitas pengayaan uranium sebelum sebuah negosiasi dapat terjadi. Dialog yang setara sulit terjadi apabila Amerika Serikat tidak mengakui hak sah Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir sipil, dan tetap bersikukuh untuk mengabaikan kebutuhan-kebutuhan Iran (dengan argumen bahwa Iran adalah negara kaya sumber energi yang tidak membutuhkan tenaga nuklir), dan hanya berpatokan terhadap apa yang menjadi kepentingannya. Hal inilah yang kemudian dipandang oleh Iran sebagai sebuah ketidakadilan dan arogansi Amerika Serikat.

Melalui pengaruhnya di Dewan Keamanan PBB Amerika Serikat berhasil meyakinkan sekutunya di Dewan Keamanan, untuk memberlakukan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1696 dan 1737 pada tahun 2006, 1747 pada tahun 2007 yang diarahkan

untuk melumpuhkan jalur *supply* program nuklir Iran dan mencegahnya untuk berkembang. Russia dan China merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan hak veto yang tidak sepenuhnya sejalan dengan tiga anggota Dewan Keamanan yang lain (Amerika Serikat, Inggris dan Perancis), yang menginginkan adanya sanksi baru. Baik Russia maupun China sama-sama menginginkan proses negosiasi dan diplomasi sebagai solusi utama. Suatu hal yang bertolak belakang dengan pendekatan yang diambil Amerika Serikat. Penerapan sanksi baru atau bahkan opsi militer dikhawatirkan hanya akan memperburuk masalah. Kedua negara juga memiliki posisi yang sama-sama strategis sebagai mitra Iran. Secara politik Iran, Russia dan China berbagi persepsi yang sama terkait perlunya penyeimbang bagi pengaruh Amerika Serikat di kawasan, disamping secara ekonomi keduanya menjalin hubungan perdagangan yang intensif dengan Iran terutama dalam sektor energi. Kepentingan-kepentingan strategis inilah yang dapat dikatakan mendasari pendirian Russia dan China yang berbeda.

Diplomasi dan negosiasi sebagai solusi utama haruslah dilandasi adanya *confidence* dan *trust* antara pihak yang melakukan negosiasi. Kedua hal tersebut kemudian dapat membantu meredakan ketegangan (*hostility*) antara para pihak, dalam hal ini antara Iran dan Amerika Serikat. dengan demikian dapat lebih jauh menghapus sanksi-sanksi unilateral Amerika Serikat, intervensi dan retorika-retorika ofensif diantara keduanya, pengakuan dan legitimasi terhadap kepentingan nasional Iran di kawasan sehingga dapat mengembalikan harga diri Iran sebagai sebuah bangsa dan kembali mengembangkan potensi hubungan politik dan ekonomi dengan komunitas internasional.

Jalur diplomasi memang memiliki beberapa kesulitan. Namun selama hambatan utama berupa syarat prekondisi yang harus dipatuhi Iran sebelum memulai negosiasi tetap dipertahankan, maka kemungkinan berlangsungnya proses negosiasi yang lebih baik, kecil kemungkinannya untuk dapat terjadi. Sebenarnya Iran pernah mematuhi syarat prekondisi ini dengan menghentikan program nuklirnya selama dua tahun selama melakukan negosiasi dengan Uni Eropa. Namun, karena negosiasi tersebut tidak menghasilkan keputusan konkrit dan Uni Eropa tidak memiliki rencana solusi jangka panjang selain hanya bertumpu pada syarat mutlak agar Iran menghentikan program nuklirnya, Iran kembali melanjutkan program nuklirnya.

Syarat prekondisi tersebut dapat dikatakan sebagai ganjalan terhadap potensi diplomasi antara para pihak. Diplomasi dapat berkembang apabila; negara-negara Eropa dapat mendorong untuk dihapusnya syarat prekondisi sebelum negosiasi atau mencari kompromi lain agar Iran dan Amerika Serikat dapat bernegosiasi. Untuk mencapai kondisi tersebut, baik Iran maupun Amerika Serikat harus membuat konsesi yang saling memperhatikan hak sah masing-masing negara. Iran harus menyediakan keterangan-

keterangan objektif yang membuktikan bahwa program nuklirnya memang untuk tujuan damai. Sedangkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya harus memberikan tawaran yang menghargai Iran sebagai sebuah bangsa besar yang memiliki banyak kontribusi bagi peradaban, memberikan akses bagi sumber energi selain minyak dan gas, dan menjamin keamanan nasional serta integritas teritorialnya.

Sebenarnya Amerika Serikat pernah mengadakan perjanjian dengan Iran pada tahun 1980 berkaitan dengan krisis penyanderaan. Perjanjian yang dikenal dengan Algiers Accord ini mengatur mengenai komitmen Amerika Serikat untuk tidak melakukan intervensi baik secara langsung, maupun tidak langsung, secara politis maupun militer ke dalam urusan-urusan dalam negeri Iran. Apabila Amerika Serikat tetap mematuhi isi perjanjian tersebut, ditambah dengan keinginan untuk mengakhiri retorika dan ancaman terhadap Iran, dapat menjadi suatu kebijakan yang cukup kuat untuk mendukung kembalinya kehormatan dan harga diri Iran sebagai suatu bangsa. Kebijakan semacam ini juga akan merubah persepsi negatif Amerika Serikat di mata masyarakat Iran, terutama terkait intervensi isu-isu nasional. Amerika Serikat juga harus mengakhiri dan berhenti mendukung wacana perubahan rezim di Iran. Suatu hal yang apabila terus dilakukan justru akan membawa kerugian bagi Amerika Serikat dan tidak memberikan kontribusi yang positif bagi upaya-upaya diplomasi.

Solusi lain yang mungkin diterapkan adalah pembentukan sebuah konsorsium internasional dalam program nuklir Iran. Hal ini pernah ditawarkan Iran dalam proposal yang diajukan kepada Uni Eropa. Konsorsium ini memungkinkan terciptanya transparansi yang dapat memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian, untuk dapat terlibat sepenuhnya dalam program nuklir Iran. Hal ini terutama diarahkan untuk negara-negara yang memiliki kekhawatiran dan kecurigaan terhadap program nuklir Iran. proposal bersifat sukarela yang juga pernah diajukan oleh IAEA ini, memosisikan fasilitas-fasilitas nuklir Iran ke dalam MNA, atau *Multi National Arrangements*. Dimana dengan partisipasi aktif dari negara-negara anggota NPT yang memiliki nuklir maupun tidak, dan juga negara-negara bukan anggota NPT dapat membentuk suatu mekanisme *Confidence Building Measures* atau CBM yang kemudian diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun kepercayaan dan hubungan diplomatis diantara negara-negara yang terlibat.

Disamping itu melalui adanya kerjasama-kerjasama, pengaturan-pengaturan, dan kesepakatan-kesepakatan yang bersifat sukarela dalam bidang kepemilikan ataupun operasional rutin, maka segala kegiatan dalam fasilitas pengayaan tersebut, dapat diawasi oleh semua pihak yang terlibat secara transparan. Sehingga diharapkan akan mampu meredam kekhawatiran dan kecurigaan terhadap program nuklir Iran. Anggota dari konsorsium tersebut bisa saja negara-negara Uni Eropa ditambah dengan Russia. Sebenarnya respon Uni Eropa terhadap proposal Iran ini cukup antusias pada awalnya.

Meskipun kemudian karena tekanan dari Amerika Serikat, proposal tersebut kemudian ditolak. Sebenarnya apabila proposal tersebut diterima, Iran akan memikirkan kembali mengenai pembangunan fasilitas-fasilitas pengayaan yang terpisah-pisah. Dengan demikian memudahkan monitoring menyeluruh oleh IAEA. sebuah konsorsium internasional di bawah pantauan langsung IAEA tidak hanya akan meningkatkan kepedulian terhadap program nuklir Iran, tetapi juga dapat menjadi model acuan bagi negara-negara lain yang berniat untuk memulai program nuklir.

